
KORPS KORUPSI DI NEGERI KLEPTOKRASI

Oleh Nurhadi

Menurut Transparansi Internasional yang membuat peringkat negara-negara terkorup di dunia, tahun ini Indonesia menempati ranking ke-6. Sungguh suatu prestasi yang tidak buruk dalam hal keburukan, korupsi. Ada yang menyatakan bahwa korupsi sudah merupakan budaya di Indonesia. Oleh karena itu sulit untuk diberantas. Bahkan jauh-jauh hari, Mochtar Lubis pada tahun 1960-an telah menengarai bangsa Indonesia tidak bisa lagi membedakan mana yang termasuk tindak korupsi dan mana yang bukan. Kalau kita naik motor tanpa surat-surat yang lengkap, kemudian ada razia dan kita ditilang oleh polisi, seringkali kita mengajukan “damai” dengan polisi yang menilang kita. Dalam persepsi umum, tindakan melanggar hukum hanya ditujukan kepada para polisi yang melakukan pungli itu; tapi jarang sekali yang menuduh kita, para pengendara motor itu, yang melanggar dua kesalahan sekaligus: pertama, melanggar peraturan lalu lintas karena tidak memiliki surat-surat seperti SIM dan STNK, dan yang kedua menyuap polisi.

Kasus di atas merupakan sebuah kasus keseharian yang dapat kita temui sebagai cerminan keseluruhan. Belum lagi praktik-praktik yang dilakukan di sektor kasus-kasus hukum yang dikenal dengan istilah “mafia peradilan”, *mark up-mark up* berbagai proyek yang dilakukan oleh sejumlah instansi, pemberian berbagai macam komisi dalam anggaran belanja, maupun berbagai praktik lain yang secara konstitusional dibikin sah secara hukum, seperti kasus “mesin cuci” dan kendaraan para anggota DPR. Kasus-kasus lain juga dilakukan oleh para tokoh, yang dulunya disebut sebagai aktivis yang menentang praktik-praktik korupsi, sebut saja misalnya Akbar Tanjung (dalam kasus *Buloggate* yang “dilegalkan” tidak bersalah oleh hukum), Mulyana W. Kusuma (dalam kasus dana pengadaan barang KPU yang kini pengadilannya tengah berlangsung), bahkan oleh tokoh-tokoh penegak hukum (seperti dalam kasus “MA vs Probosutedjo yang kini masih dalam tingkat penyidikan), dan sejumlah kasus lainnya. Saking maraknya tindak korupsi terjadi, kita seringkali dengan mudah melupakan suatu kasus korupsi karena disusul kasus lain dalam skala yang lebih besar dan lebih heboh.

Dalam instansi-instansi negeri atau negara ditengarai tindak pembocoran anggaran negara (yang menurut Sumitro Djojohadikusumo mencapai angka 30%) tidak dilakukan oleh perseorangan yang melakukan *penilepan*, tetapi dilakukan secara beramai-ramai, mulai dari atasan yang bertanda tangan, bendahara atau pemegang kas, kepala pengadaan barang atau pelelang tender, hingga ke pegawai-pegawai pelaksana di lapangan. Bisa jadi sang kepala tidak tahu persis tentang aliran dana, tapi sebagai atasan yang mengepalai sebuah korps instansi tertentu dia bakal disodori pemegang kas “bagian” yang relatif banyak, pejabat di bawahnya lebih sedikit “jatahnya”; persis seperti hirarki kepangkatan mereka. Memang, kalau kasus korupsi di instansinya terbongkar, dialah yang bakal dituntut dengan hukuman yang lebih berat. Sialnya lagi, kalau atasan itu tidak mendapatkan apa-apa tetapi malah dia yang dihukum, gara-gara “diperalat” anak buahnya atau atasannya yang lebih tinggi.

Korupsi secara beramai-ramai ini seringkali melibatkan banyak orang dalam sebuah institusi sehingga kalau ada inspeksi atas keganjilan yang ditemukan, sukar

sekali membongkarnya karena mereka sebagai atasan dan bawahan saling “melindungi” dan dilanjutkan dengan “kerja sama” dengan auditor. Tidak salah jika ada orang yang menamai Indonesia sebagai negara “Kleptokrasi”.

Ada sebuah kisah yang menarik tentang seorang polisi yang jujur. Karena prestasinya, dia dipromosikan menjadi seorang kepala polisi di daerah perbatasan Kalimantan dengan Serawak. Karena kejujurannya, banyak kesempatan uang suap, komisi dan sejenisnya yang dia tolak. Bukannya pujian yang dia peroleh atas tindakannya itu, melainkan cibiran dan sikap tidak senang dari para bawahannya karena kini mereka tidak mendapatkan lagi “bonus” seperti yang selalu mereka peroleh dari atasannya dulu. Atas laporan para bawahan sebagai pemimpin yang “tidak kooperatif”, kepala polisi itu akhirnya dimutasi.

Kejadian serupa juga yang pernah diungkapkan oleh seorang pejabat lewat “surat pembaca” sebuah koran. Dia seorang pejabat yang baru diangkat sebagai kepala baru suatu departemen di Jakarta. Tindakannya yang tidak mau kompromi terhadap praktik-praktik korupsi dan kolusi mendatangkan sikap tidak nyaman dari para anak buahnya. Dia tidak bisa lagi bekerja dengan tenang dan nyaman di kantornya. Hal inilah yang seringkali terjadi. Tidak mudah menjadi seorang yang jujur (apalagi miskin dengan standar gaji Indonesia yang “paling rendah” di dunia), di tengah-tengah iklim pemberian komisi yang sudah menjadi kewajiban, memenangkan tender berdasarkan siapa yang memberi *fee* yang terbesar, masuk kerja harus membawa uang pelicin, dan mengurus surat-surat tertentu harus dengan disertai amplop.

Setiap kali naik jabatan, seseorang dituntut oleh masyarakat (secara sosial) harus mengganti jenis mobil yang dikendarainya. Setiap kali ada acara donasi atau sumbangan sosial, seorang pejabat dituntut menyumbang dengan besaran sesuai dengan pangkat dan kedudukan yang disandangnya. Tidak banyak seorang menteri yang mau datang ke tempat resepsi dengan naik mobil butut seperti yang dilakukan Mari'e Muhammad semasa masih menjabat sebagai menkeu. Tepatnya, menjadi orang jujur di Republik Maling ini ibarat seseorang yang tengah melawan arus air bah, melawan laju angin topan, dan melawan gerakan tanah longsor. Sulit untuk tidak terbawa arus. Saya seringkali berprasangka apa yang menimpa tokoh-tokoh mantan aktivis seperti Akbar Tanjung dan Mulyana di atas, adalah orang-orang yang terbawa arus, atau malah tergilas arus. Mereka tidak bisa berkelit.

Bagaimana memberantas praktik-praktik korupsi di negeri ini? Ini mungkin pertanyaan absurd bagi para pemimpin yang memiliki niat baik untuk memberantasnya. Barangkali mereka akan menjawab: dimulai dari atasan. Sementara pihak rakyat yang tidak sabar dan geram atas situasi ini menginginkan Indonesia menerapkan seperti apa yang dilakukan Cina dengan melakukan hukuman mati meskipun banyak mendapat kecaman dari dunia atas nama HAM. Bahkan ada wacana bagi para koruptor untuk dikenai praduga bersalah dalam pengadilan, dan mereka harus membuktikan diri kalau mereka tidak melakukan korupsi. Ada lagi sebuah partai politik, yang menganjurkan para anggotanya untuk memboikot para koruptor: yakni dengan cara tidak menghadiri undangannya kalau mereka “mantu” atau menikahkan anaknya. Ada seorang mantan presiden yang menganjurkan agar gaji para pejabat dinaikkan beberapa kali lipat sehingga mereka tidak korup lagi. Akan tetapi, penentang mereka jauh lebih kuat sehingga sejumlah sanksi itupun tumpul dalam praktik pelaksanaannya.

Permasalahannya, korupsi bukan hanya praktik politik atau praktik sosial, tetapi sudah menjadi praktik budaya di Indonesia. Pramoedya Ananta Toer pernah menyatakan para pejabat yang merupakan kepanjangan dari praktik para raja zaman feodal memang merasa berhak untuk mendapatkan upeti dari bawahannya dan sekaligus berkewajiban memberikan perintah. Oleh karena itu, para pejabat (dari struktur tertinggi hingga terendah) tidak pernah memiliki "sense" melayani dan sebaliknya, mereka merasa berkuasa untuk memerintah. Oleh karena itu, kata *government* diindonesiakan menjadi pemerintah, orang yang kerjanya hanya memberi perintah dan terima upeti.

Pernah berhadapan "pejabat" atau *officer* yang marah-marah gara-gara kita "ganggu" untuk sesuatu urusan administrasi? Jelas-jelas dia tidak sedang melakukan apa-apa atau malah sedang membaca koran, tapi dia tidak menjalankan tugasnya melayani kita; yang untuk itu dia dibayar. Goenawan Mohamad pernah menemui situasi seperti ini. Para pegawai negeri itu tidak melakukan apa-apa selain membaca koran dan main catur, tulisnya dalam salah satu *Catatan Pinggirnnya*. Lain halnya jika *sang officer* itu kita sodori amplop. Dia tidak hanya sekedar menjalankan tugasnya dengan cekatan, malah sikapnya berubah meperlakukan kita layaknya atasannya saja.

Sekiranya korupsi merupakan persoalan politik, untuk memberantasnya cukup diperlukan beberapa periode kepresidenan saja. Sekiranya korupsi merupakan persoalan sosial, untuk memberantasnya diperlukan waktu yang lebih lama, mungkin lima puluh tahun. Sekiranya korupsi merupakan persoalan budaya, untuk memberantasnya, seratus tahun belumlah cukup untuk mengubah budaya bangsa itu.

Kita bisa bercermin pada Singapura, tetangga kita, yang peringkat korupsinya menurut Transparansi Internasional berbanding terbalik dengan Indonesia. Semasa Lee Kwan Yuu menjadi perdana menteri (yang tentu saja bergaji besar, bandingkan gaji presiden Indonesia yang seringkali gajinya tidak lebih tinggi dari salah satu presiden direktur BUMN-nya) ke kantornya selalu membawa termos dari rumah. Artinya, untuk minum pun dia tidak menggunakan minuman yang disediakan negara. Mentalitas semacam inilah yang diperlukan oleh orang-orang kita, dalam posisi apa pun; yakni mentalitas menentang arus. Orang Jepang menamai spirit ini dengan istilah *koinobori*.

Tampaknya, inilah mentalitas yang perlu kita tanamkan dalam institusi-institusi pendidikan kita, spirit menentang arus yang tidak dimiliki dalam budaya kita; spirit untuk tidak terjerumus dalam praktik kleptokrasi. Bukankah praktik-praktik korupsi berawal dari sekolah? Awalnya, mereka dibiarkan oleh gurunya untuk menyontek, menyalin jawaban yang telah dipersiapkan sebelumnya ke lembar jawaban ulangannya. Begitupun ketika mereka kuliah di perguruan tinggi. Ketika lulus dan menduduki posisi jabatan tertentu, mereka tidak lagi memindahkan contekannya, melainkan memindahkan angka-angka dari kas negara atau publik ke dalam rekening pribadinya. Malah ada yang memindahkannya ke rekening perempuan simpanannya.

Wedomartani, 27 Oktober 2005

Artikel no 34 dimuat di Jurnal Ekspresi, Jurnal Mahasiswa FBS UNY edisi Desember 2005;
kode: korps korupsi
